

Journal Unair

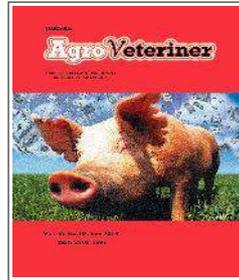
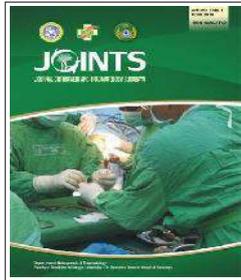
MEDICINE
journal category
LAW
journal category

SCIENCES
journal category
ECONOMY
journal category

ANIMAL-AGRICULTURE
journal category
PHARMACY
journal category
HEALTH
journal category

PSYCHOLOGY
journal category

SOCIAL HUMANISM
journal category



Detail Article

Masyarakat, Kebudayaan dan Politik

ISSN Lama 0216-2407, Baru 2086-7050

Vol. 26 / No. 2 / Published : 2013-04

Order : 3, and page :90 - 107

Related with : [Scholar](#) [Yahoo!](#) [Bing](#)

Original Article :

Model pemberdayaan komunitas buruh anak perempuan yang bekerja di sektor perkebunan tembakau di Jawa timur

Author :

Sudarso*¹ Karnaji*² Siti Mas'udah*³

1. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
2. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Abstract :

The prolonged monetary crisis in Indonesia has caused child labour in this country still exist. Even worse, the number of child labours was still in millions. Besides the absolute addition of child labour numbers, another two consequences caused by the crisis were: First, the crisis lead the children, who dominantly worked for their family, being forced out of their family and worked as labourers. Second, the crisis also lead to the additional working hours for child labours. Specifically, these were some issues examined in this research: 1) How was the overview of exploitation and discrimination of girl labourers who worked in a tobacco plantation? 2) What were the factors that made the girl labourers survived in tobacco plantation sector? 3) What was the proper strategy and right community empowerment model to alleviate girl labourers from tobacco plantation sector? The descriptive data were from child labourers working in the plantations. There were 60 girls being interviewed. The data obtained in this study came from two types of data--primary and secondary data. This research found that, the plantation owners hired underage girl labourers because they were more diligent. Second, the main reason the underage girls working in the plantations was due to economy factor. Third, the marginal and bargaining position of exploited girl labourers in relations of production was low, for example: receiving low wages, different treatment compared to adult labourers, and in some cases, sexual harassment. Fourth, the empowerment strategy of child labourers was supposed to be embodied within four pillars: girl labourers, family, local community, and government.

Keyword :

child labour, underage girl, exploitation, tobacco plantation, sexual harassment,

References :

Dahrendorf R,(1986) Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri: Sebuah Analisa Kritik Jakarta : Rajawali Pers

Giddens A & Held D,(1987) Perdebatan klasik dan Kontemporer Mengenai Kelompok, Kekuasaan, dan Konflik Jakarta : Rajawali Pers

Suharto E,(2005) Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Bandung : CV. Refika Aditama



Archive Article

Cover Media	Content
 <p>Volume 26, nomor 2, April-Juni 2013</p> <p>Volume : 26 / No. : 2 / Pub. : 2013-04</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses Dan Informasi Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Kesehatan Reproduksi Dan Seksualitas 2. Kelembagaan Lokal Dan Adaptasi Perubahan Iklim Pada Komunitas Nelayan Di Pulau Ambon, Maluku 3. Model Pemberdayaan Komunitas Buruh Anak Perempuan Yang Bekerja Di Sektor Perkebunan Tembakau Di Jawa Timur 4. Desentralisasi Dan Efektivitas Pemerintahan Daerah Kabupaten Maros 5. Politik Representasi Perempuan: Advokasi Kebijakan Perlindungan Perempuan

Information MKP

About MKP

Address/Alamat Redaksi

For Authors/ Ketentuan Penulisan Artikel

price info /harga jurnal

susunan redaksi

Pernyataan Penulis

Lampiran (arti Plagiarism)

Profil Anggota Redaksi

Laman Baru MKP

e-journal Unair



[Continue »](#)

Licensed

All of the journals are published by Universitas Airlangga that free to access and download the articles.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](#).

Journal Account Users

Please enter your email

Other Link

Official Web Unair
E-journal
Repository

Statistic



I'm not a robot

reCAPTCHA
Privacy - Terms

Digilib
Official web PPJPI

About Journal

Vision & Mission, Goals
Development Team of
Scientific Journals

Copyright © 2019 - (Upgrade version) All Rights Reserved - Journal Unair

Template by OS Templates



Model pemberdayaan komunitas buruh anak perempuan yang bekerja di sektor perkebunan tembakau di Jawa Timur

Empowerment model for underage girls working in the tobacco plantation in East Java

Sударso, Karnaji, & Siti Mas'udah

Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Airlangga
Jalan Airlangga 4-6 Surabaya 60286, Indonesia. Telepon: (031) 5011744.
E-mail: sudarso7unair@yahoo.com

Abstract

The prolonged monetary crisis in Indonesia has caused child labour in this country still exist. Even worse, the number of child labours was still in millions. Besides the absolute addition of child labour numbers, another two consequences caused by the crisis were: First, the crisis lead the children, who dominantly worked for their family, being forced out of their family and worked as labourers. Second, the crisis also lead to the additional working hours for child labours. Specifically, these were some issues examined in this research: 1) How was the overview of exploitation and discrimination of girl labourers who worked in a tobacco plantation? 2) What were the factors that made the girl labourers survived in tobacco plantation sector? 3) What was the proper strategy and right community empowerment model to alleviate girl labourers from tobacco plantation sector? The descriptive data were from child labourers working in the plantations. There were 60 girls being interviewed. The data obtained in this study came from two types of data--primary and secondary data. This research found that, the plantation owners hired underage girl labourers because they were more diligent. Second, the main reason the underage girls working in the plantations was due to economy factor. Third, the marginal and bargaining position of exploited girl labourers in relations of production was low, for example: receiving low wages, different treatment compared to adult labourers, and in some cases, sexual harassment. Fourth, the empowerment strategy of child labourers was supposed to be embodied within four pillars: girl labourers, family, local community, and government.

Keywords: *child labour, underage girl, exploitation, tobacco plantation, sexual harassment*

Abstrak

Krisis ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia, mengakibatkan fenomena buruh anak masih ada di Indonesia, bahkan jumlah masih jutaan. Selain terjadi penambahan jumlah absolut pekerja anak, dua akibat lain yang ditimbulkan akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan ini adalah: Pertama, krisis menyebabkan anak-anak yang semula dominan sebagai pekerja keluarga, sebagian diantaranya terpaksa keluar dari keluarganya dan bekerja sebagai buruh. Kedua, krisis juga menyebabkan terjadinya penambahan jam kerja bagi pekerja anak. Secara rinci, beberapa permasalahan yang dikaji dalam kegiatan ini adalah: (1) Bagaimanakah gambaran eksploitasi dan diskriminasi yang dialami buruh anak perempuan yang bekerja di perkebunan tembakau? (2) Faktor-faktor apa sajakah yang membuat buruh anak perempuan tersebut bertahan bekerja di sektor perkebunan tembakau? (3) Apakah strategi dan model pemberdayaan komunitas yang tepat untuk mengentaskan buruh anak perempuan dari sektor perkebunan tembakau? Penelitian ini bertipekan penelitian deskriptif dan populasinya adalah buruh anak yang bekerja di perkebunan. Jumlah sampel yang diambil adalah 60 buruh anak perempuan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari dua jenis data, yaitu: data primer dan data sekunder. Temuan pokok penelitian Buruh Anak Perempuan ini, adalah sebagai berikut: Pertama, banyaknya anak

perempuan yang bekerja di sektor perkebunan ini, karena pihak perkebunan memang lebih banyak menerima buruh perempuan, alasan utamanya adalah karena buruh perempuan dianggap lebih telaten. Kedua, Keterlibatan anak-anak perempuan di sektor perkebunan alasan utamanya karena faktor ekonomi. Ketiga, Dalam hubungan produksi di perkebunan buruh anak perempuan dalam posisi tereksplorasi, marginal dan posisi tawarnya (bargaining position) rendah, seperti upah rendah, perbedaan perlakuan dengan buruh dewasa, dan beberapa kasus mengalami pelecehan seksual. Keempat, Strategi pemberdayaan buruh anak seharusnya berada dalam empat pilar, yaitu: buruh anak perempuan, keluarga, komunitas lokal, dan pemerintah.

Kata kunci: buruh anak, perempuan, eksploitasi, perkebunan tembakau, pelecehan seksual

Pendahuluan

Di Indonesia akibat adanya krisis ekonomi sejak pertengahan tahun 1997 dan terus berlanjut hingga kini krisis global telah menyebabkan tingkat pendapatan penduduk menurun drastis yang diikuti dengan terjadinya tingkat inflasi yang tinggi. Hal tersebut bukan saja menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat sangat tajam yang ditunjukkan oleh meningkatnya penduduk miskin yang pada akhir tahun 1998 diperkirakan mencapai 49,5 juta jiwa atau bertambah sekitar 27 juta jika dibandingkan awal tahun 1996. Namun lebih dari itu dampak lanjutan yang kemudian timbul adalah semakin banyaknya jumlah pekerja anak, baik yang berusia 5-9 tahun atau 10-14 tahun.

Dari data Biro Pusat Statistik diketahui bahwa pada bulan Oktober 1990 jumlah pekerja anak tercatat sebanyak 2,05 juta usia 10-14 tahun dan kemudian terus turun hingga menjadi 1,64 juta pada Oktober 1997. Pada Agustus 1998 pekerja anak usia 10-14 tahun meningkat menjadi 1.726.640 jiwa dan pada Desember 1998 meningkat lagi menjadi 1.809.935 jiwa. Pertambahan ini terutama menonjol pada daerah perkotaan: kurang lebih 6 kali lipat bila dibandingkan pertambahan jumlah pekerja anak di pedesaan. Sementara itu, untuk pekerja anak usia 5-9 tahun pada masa 10 bulan terakhir tahun 1998 dilaporkan pula telah meningkat dengan cukup banyak, yakni menjadi 203.000 jiwa pada Desember 1998 atau meningkat 28,7 persen setahun. Sementara itu berdasarkan data Sakernas 1999, di Indonesia terdapat 6.788.048 anak berumur antara 15-19 tahun bekerja, dengan rincian ada sebanyak 4.834.179 atau 71,21% berada di daerah pedesaan, sedangkan sisanya sebanyak 28,7% berada di daerah perkotaan.

Selain terjadi penambahan jumlah absolut pekerja anak, dua akibat lain yang ditimbulkan akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan ini adalah: 1) krisis menyebabkan anak-anak yang semula dominan sebagai pekerja keluarga, sebagian diantaranya terpaksa keluar dari keluarganya dan bekerja sebagai buruh. Anak yang berusia 10-14 tahun pada periode Agustus 1997 sampai dengan Desember 1998 terjadi penambahan 4% yang bekerja sebagai buruh, sedangkan untuk pekerja anak usia 15-19 tahun terjadi penambahan 1% pada periode yang sama. Kedua, krisis juga menyebabkan terjadinya penambahan jam kerja bagi pekerja anak. Jika pada tahun 1998 pekerja anak laki-laki usia 10-14 tahun yang bekerja lebih dari 25 jam sekitar 26 persen, maka pada tahun 1999 meningkat menjadi 27%. Pekerja anak perempuan jika semula hanya 26 persen yang bekerja lebih dari 25 jam per minggu (1998), maka setelah krisis meningkat menjadi sekitar 27 persen. Sementara itu, untuk pekerja anak laki-laki usia 15-19 tahun yang bekerja lebih dari 25 jam per minggu, jika pada 1998 ada sekitar 63 persen, maka pada tahun 1999 meningkat menjadi 66 persen. Sedangkan pekerja anak perempuan di usia yang sama pada periode yang sama meningkat dari 58 persen menjadi 61 persen.

Beberapa studi tentang pekerja anak telah membuktikan banyaknya tindakan-tindakan yang merugikan anak, seperti kondisi jam kerja yang panjang, berupah rendah, menghadapi resiko

kecelakaan kerja, gangguan kesehatan, atau menjadi sasaran pelecehan dan kesewenang-wenangan orang dewasa. Hasil kajian Irwanto (1995), misalnya menemukan sekitar 71,9% pekerja anak bekerja selama lebih dari 7 jam sehari. Pekerja anak yang menjadi pembantu rumah tangga dan mereka yang bekerja di jermal bahkan bekerja lebih dari 12 jam sehari.

Salah satu contoh penelitian yang membuktikan bahwa anak yang bekerja itu berada dalam kondisi yang berbahaya bagi kesehatan fisik dan perkembangan mental dan disertai adanya eksploitasi dilakukan oleh Mustai'in dkk (2001), yang melakukan penelitian di Sampang, Probolinggo dan Bondowoso, dimana ada beberapa buruh anak yang bekerja selain jam kerjanya panjang sekitar 8-9 jam, juga berada di tempat yang sirkulasi udara tidak nyaman, serta menghirup bau yang menyengat yang berasal dari bahan baku dan beberapa zat kimia, misalnya tembakau dan rokok.

Secara rinci, beberapa permasalahan yang dikaji dalam kegiatan ini adalah: 1) bagaimanakah gambaran eksploitasi dan diskriminasi yang dialami buruh anak perempuan yang bekerja di perkebunan tembakau? 2) faktor-faktor apa sajakah yang membuat buruh anak perempuan tersebut bertahan bekerja di sektor perkebunan tembakau? dan 3) apakah strategi dan model pemberdayaan komunitas yang tepat untuk mengentaskan buruh anak perempuan dari sektor perkebunan tembakau?

Memahami persoalan sektor perkebunan tentunya tidak akan lepas dengan kapitalisme, karena di dalam ada komponen kapital (pengusaha perkebunan) dan tenaga kerja (buruh). Seperti yang diungkap Marx, kapitalisme meliputi dua unsur dasar, pertama, ia berdasar pada pembelian dan penjualan kekuatan tenaga kerja (kapasitas kerja individual), dan karena itu tenaga kerja adalah komoditi. Kedua, ia adalah sistem dimana para pengusaha menangani produksi komoditi supaya mendapatkan keuntungan maksimum, dan supaya dapat menaikkan kelipatan jumlah keuntungan. Alasan era kapitalis dapat membeli tenaga kerja kurang dari nilai penuhnya ialah bahwa mereka mempunyai kekuatan ekonomis. Mereka mempunyai sarana produksi, dan para buruh menjual tenaganya untuk bertahan hidup, karena itu mereka harus melakukannya menurut kepentingan para kapitalis.

Tujuan produksi ialah akumulasi kapital, para kapitalis harus selalu menjaga harga tenaga kerja serendah mungkin. Kalau harga tenaga kerja naik, keuntungan kapitalis akan jatuh. Jadi hubungan antara kapital dan para buruh secara inheren adalah hubungan yang antagonistik, bila buruh untung maka kapitalis rugi, dan sebaliknya. Akhirnya modus kapitalis dalam produksi membawa kepada sebuah pembagian kelas antara kelas pekerja atau proletariat, di satu pihak, dengan kelas kapitalis di pihak lain, dan hubungan-hubungan kelas tersebut menjadi konfliktual karena para buruh dipaksa menjalin hubungan yang tidak sederajat.

Dari pemikiran Marx diatas, nampaklah bahwa fenomena munculnya buruh anak dalam sektor perkebunan sangatlah dipahami dalam kerangka menjaga keuntungan kapitalis, artinya penggunaan tenaga kerja anak akan banyak menguntungkan para kapitalis, karena buruh anak bisa diperlakukan secara tidak adil dan dieksploitasi seperti, upah rendah dan jam kerjanya panjang serta perlakuan lainnya yang merampas haknya sebagai pekerja dan memperburuk kualitas hidup dari anak tersebut.

Dari beberapa hasil penelitian tentang pekerja (buruh) anak ditemukan ada dua kelompok variabel yang mempengaruhi munculnya anak-anak yang bekerja, yaitu: variabel makro dan variabel mikro. Variabel-variabel makro adalah: (1) kemiskinan; (2) biaya pendidikan dasar; (3) kompetisi perdagangan (internasional dan nasional); (4) lemahnya perangkat perundangan tenaga kerja; (5) nilai-nilai kultural. Sedangkan variabel-variabel mikro adalah: (1) pendidikan orang tua; (2) besarnya rumah tangga; (3) rumah tangga yang dikepalai oleh wanita mempunyai tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap tekanan ekonomi; (4) pekerjaan orang tua. Orang

tua yang bekerja di rumah cenderung melibatkan anak-anak mereka. Demikian juga jika orang tua bekerja borongan. Pekerjaan-pekerjaan tertentu, seperti (buruh) petani, pengrajin atau pemulung akan cenderung melibatkan anak; (5) proximitas dengan industri/kota. Jauh dekatnya tempat tinggal dengan daerah industri akan menentukan besar kecilnya daya tarik industri terhadap anak.; (6) nilai anak; (7) hubungan anak dan orang tua. Hubungan keluarga yang kurang harmonis, khususnya orangtua dan anak, dapat mendorong anak untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya sendiri; (8) adanya model atau panutan. Pengamatan lapangan cenderung menunjukkan bahwa adanya pengaruh anggota keluarga yang telah bekerja, khususnya di sektor informal dan pelayanan domestik.

Gejala munculnya pekerja anak ini dapat dijelaskan dari dua teori: Pertama, teori strategi kelangsungan rumah tangga (*house hold survival strategy*) dari Harbinson. Menurut teori ini dalam masyarakat pedesaan yang mengalami transisi dan golongan miskin di kota, akan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia bila kondisi ekonomi mengalami perubahan. Penggunaan tenaga kerja keluarga menjadi alternatif dalam menghadapi masalah ini. Kalau tenaga kerja wanita, terutama ibu rumah tangga, belum dapat memecahkan masalah yang dihadapi biasanya anak-anak yang belum dewasa pun diikutsertakan dalam menopang kegiatan ekonomi keluarga. Jenis pekerjaan yang dijalani biasanya tidak terbatas pada pekerjaan rumah tangga, tetapi juga bekerja sebagai tenaga upahan. Kedua, teori transisi industrialisasi dari Rogers dan Standing. Teori ini menjelaskan bahwa pada tahap awal industrialisasi dibutuhkan pemupukan modal untuk meningkatkan produksi atau teknologi. Untuk menekan biaya produksi, wanita atau anak-anak akan dipekerjakan, sebab hal ini akan menekan upah. Pada sebagian besar negara-negara yang sedang berkembang, secara kultural wanita dan anak-anak dipandang bukan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup keluarga. Mereka hanyalah membantu mencari nafkah kepala keluarga. Atas dasar pandangan inilah banyak pemilik modal memperkerjakan wanita dan anak-anak sebagai butuh di industrialisasi dengan upah rendah.

Ada tiga faktor yang menjadi penyebab terjadinya pergeseran keterlibatan anak ke arah sektor publik. *Pertama*, berkait dengan kemiskinan atau ketidakmampuan ekonomi keluarga. Seperti yang dikatakan Harbinson, Chambers dan Scott (1994), salah satu upaya yang dilakukan keluarga miskin untuk menambah penghasilan keluarga, selain mengikutsertakan istri ke dalam kegiatan publik, adalah dengan memanfaatkan tenaga kerja anak meskipun acapkali mereka belum cukup umur untuk itu. Anak-anak yang belum cukup umur itu didayagunakan tidak terbatas hanya untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang menghasilkan uang, yaitu menjadi buruh anak.

Kedua, berkait dengan keinginan si anak sendiri yang dengan sadar memilih dunia “eksploitasi di luar rumah” daripada terus menerus bekerja di bawah kendali orang tua mereka sendiri. Seperti yang dikatakan Vittachi, terkadang memang terjadi dari pihak si anak itu sendiri menginginkan bekerja pada seorang majikan karena hal itu dirasa lebih memungkinkan mereka untuk mandiri dan bisa menguasai serta mengatur penghasilan mereka sendiri betapapun kecilnya.

Ketiga, berkait dengan kepentingan pengusaha yang senantiasa ingin mengakumulasikan keuntungan sebanyak-banyaknya. Hal ini bisa dimengerti karena dalam sistem yang kapitalistik di negara manapun, yang namanya pengusaha senantiasa ingin menekan biaya produksi serendah-rendahnya, khususnya upah pekerja. Dalam konteks ini, menurut Susan Joekes, salah satu usaha yang dilakukan dengan cara mempekerjakan buruh wanita atau buruh anak. Wanita dan anak-anak disukai pengusaha karena kebanyakan bersedia dibayar murah atau sekurang-kurangnya lebih murah bila dibandingkan upah buruh laki-laki dewasa.

Teori segmentasi pasar yang dikemukakan oleh Doeringer dan Piore membedakan jenis tenaga kerja atau pekerjaan atas: 1) pekerjaan-pekerjaan sektor primer yang secara relatif lebih baik di dalam hubungan dengan upah, jaminan keamanan, dan peluang untuk promosi; 2) pekerjaan-pekerjaan sektor sekunder yang memiliki upah yang rendah, jaminan keamanan yang kurang, dan peluang untuk promosi yang terbatas. Anak-anak yang bekerja sebagai buruh industri cenderung menempati posisi di sektor sekunder. Mereka menempati posisi tersebut karena status sosial mereka sebagai anak, adanya spesialisasi kerja yang tidak hanya didasarkan pada usia dan jenis kelamin, tetapi juga berdasarkan keahlian dan pendidikan. Akibat pendidikan yang rendah dan tidak adanya ketrampilan yang memadai menyebabkan buruh anak-anak berada dalam posisi ter subordinasi dan berada dalam hirarki yang paling rendah (pekerja kasar). Meskipun jam kerja panjang dan kerja yang disamakan dengan tenaga dewasa, tetapi upah yang diterima lebih rendah daripada pekerja dewasa.

Penundukan buruh anak melalui hubungan kerja ini menunjukkan adanya dominasi kekuasaan dan wewenang dalam sistem produksi kapitalis. Menurut Dahrendorf (1986) dalam setiap organisasi sosial sejumlah posisi tertentu berdasarkan peraturan hukum dipercayakan untuk mengendalikan posisi yang lain untuk menjamin penggunaan kekuasaan yang efektif. Asumsi bahwa perbedaan pembagian kekuasaan dan wewenang senantiasa menjadi faktor yang menentukan dari sejenis pertentangan sosial sistematis yang berhubungan erat dengan pertentangan kelas menurut pengertian tradisional (Marxian).

Pertentangan kelompok sebenarnya bukanlah hasil dari hubungan kekuasaan struktural yang terjadi secara serampangan melainkan yang muncul dimana saja wewenang dilaksanakan dan berarti bahwa di semua masyarakat di seluruh kondisi historis: (1) hubungan wewenang adalah selalu berbentuk hubungan antara supra-subordinasi, hubungan atas-bawah; (2) dimana terdapat hubungan wewenang, disini unsur atas (super ordinate) secara sosial diperkirakan—dengan perintah dan komando, peringatan dan larangan-larangan—mengendalikan perilaku unsur bawah (sub ordinate); (3) perkiraan demikian secara relatif lebih dilekatkan kepada posisi sosial daripada kepada kepribadian individual; (4) berdasarkan pada kenyataan ini hubungan wewenang selalu meliputi spesifikasi orang-orang yang harus tunduk kepada pengendalian dan spesifikasi dalam bidang-bidang yang mana saja pengendalian itu diperbolehkan; (5) wewenang adalah sebuah hubungan yang sah tidak tunduk kepada perintah orang yang berwenang dapat dikenai sanksi tertentu .

Dari pemikiran Dahrendorf diatas, dapat disimpulkan bahwa dibalik kekuasaan dan wewenangnya para pengusaha perkebunan menjadi penguasa yang tindakannya seolah-olah selalu benar dan bisa melakukan apapun demi kepentingan akan keuntungan yang lebih besar bagi usaha perkebunannya. Sementara itu buruh anak selalu berada dalam posisi yang ter subordinasi atau menjadi obyek perlakuan diskriminatif dan eksploitatif, meskipun sebenarnya buruh anak tersebut mempunyai sumbangan yang signifikan terhadap keuntungan usaha perkebunan tembakau.

Secara konseptual pemberdayaan berasal dari kata “*power*” yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Kekuasaan senantiasa selalu hadir dalam konteks hubungan sosial antar manusia dan tercipta melalui hubungan itu. Karena itulah kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemaknaan kekuasaan yang seperti ini, maka pemberdayaan itu merupakan suatu proses perubahan yang kemudian memiliki konsep yang bermakna. Hal ini selaras dengan pengertian pemberdayaan yang dikemukakan oleh Parson, et.al (Suharto 2005:59) yang menyatakan bahwa: Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam

berbagai pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Suharto (2005:58), pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang khususnya kelompok rentah dan lemah sehingga mereka memiliki kemampuan dalam: (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan; (c) berpartisipasi pada proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang akan mempengaruhi mereka. Selanjutnya Suharto (2005:59) mengatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Pemberdayaan dikatakan sebagai sebuah *proses* adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan dan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Sedangkan sebagai *tujuan*, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh suatu perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, ekologi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan.

Metode Penelitian

Penelitian ini secara *purposive* memilih daerah perkebunan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, dengan alasan kabupaten tersebut merupakan daerah yang sebagian besar lahannya diperuntukkan untuk kegiatan di sektor perkebunan, dan perkebunan yang menjadi tonggak perekonomian kabupaten ini adalah perkebunan tembakau, dan karet/kopi.

Populasi penelitian ini adalah buruh anak yang bekerja di perkebunan. Jumlah sampel yang diambil adalah 60 buruh anak perempuan, dengan pertimbangan bahwa dengan jumlah tersebut akan diperoleh gambaran buruh anak perempuan yang memadai.

Pengambilan jumlah 60 buruh anak tersebut dengan menggunakan teknik *purposive*, yaitu dengan meminta bantuan LSM yang pernah melakukan pendampingan di daerah perkebunan tersebut untuk menunjukkan buruh anak perempuan yang bekerja di sektor perkebunan.

Data yang diperoleh dalam penelitian buruh anak perkebunan ini berasal dari dua jenis data, yaitu: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan menggunakan cara: 1) melakukan wawancara dengan menggunakan seperangkat kuesioner untuk mendapatkan gambaran umum tentang buruh anak perkebunan; 2) wawancara secara mendalam pada buruh anak dengan menggunakan seperangkat pedoman wawancara. Observasi secara langsung tentang keadaan buruh anak di tempat kerjanya juga dilakukan. Sementara data sekunder diperoleh dari Laporan Penelitian, jurnal, artikel, Biro Pusat Statistik (BPS) dan buletin yang diterbitkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berkecimpung dalam penanganan buruh anak di sektor perkebunan.

Dalam melakukan analisis dalam penelitian ini, ada dua tahap yang dilakukan, yaitu: 1) data yang diperoleh dari wawancara yang menggunakan kuesioner, akan mendapatkan data yang lebih merupakan gambaran umum tentang eksploitasi buruh anak. Dalam tahap ini lebih banyak menganalisis data-data kuantitatif; 2) dari gambaran umum tersebut kemudian dilakukan

pemilahan atau klasifikasi, dan diperoleh klasifikasi seperti kasus-kasus perlawanan terbuka dan terselubung. Tahap kedua ini lebih banyak menganalisis data-data kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Deskripsi buruh anak perempuan: Temuan lapangan

Membicarakan buruh perkebunan tembakau pasti tidak akan lepas dari keberadaan buruh perempuan. Memang hampir semua pekerjaan pertembakauan diserahkan pekerjaannya pada perempuan. Mulai dari kegiatan di lahan sampai dengan kegiatan di gudang. Beberapa buruh laki-laki terlibat juga di perkebunan ini dan lebih banyak menangani pekerjaan yang membutuhkan tenaga, seperti mengangkut hasil petik daun dari sawah ke mobil pengangkut, menggarap lahan, dan penyiapan gudang serta pengepakan daun.

Banyaknya anak perempuan yang bekerja di sektor perkebunan ini, karena pihak perkebunan memang lebih banyak menerima buruh perempuan, alasan utamanya adalah karena buruh perempuan dianggap lebih telaten dan rapi dalam mengatur daun tembakau yang sangat rentan dengan perlakuan kasar, karena mudah robek. Temuan ini memperkuat temuan dari penelitian Rilanto, bahwa pekerja anak di sektor formal, kebanyakan di dominasi oleh perempuan.

Sementara itu sekitar 70 persen buruh anak perempuan perkebunan berusia antara 14 sampai 17 tahun. Lebih banyaknya anak yang berusia sekitar 14-17 tahun ini wajar, karena dari segi tampilan fisik mereka seolah-olah sudah terlihat dewasa, dan terutama di pekerjaan gudang seng, umumnya mensyaratkan adanya pemilikan Kartu Penduduk. Jadi banyak sekali kejadian buruh anak yang usia sekitar 16 tahun ke bawah ini mempunyai KTP, karena meninggikan umur agar bisa diterima bekerja di perkebunan tembakau tersebut.

Berdasarkan tingkat pendidikannya, buruh anak perkebunan, menunjukkan bahwa 35 persen masih sekolah, bahkan ada sekitar 25 persen hanya tamat Sekolah Dasar. Keputusan untuk bekerja diperkebunan dan meninggalkan bangku sekolah, umumnya disebabkan oleh tuntutan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, karena sebagian besar buruh anak ini berasal dari keluarga yang minim pendapatannya. Ada yang orang tuanya bekerja juga sebagai buruh perkebunan, petani gurem, ada yang pedagang kecil-kecilan bahkan ada yang sudah tidak mempunyai pekerjaan sama sekali sehingga anak menjadi tumpuan hidup keluarga.

Rendahnya tingkat pendidikan selain adanya tuntutan pemenuhan kebutuhan ekonomi sehari-hari, diperkuat oleh adanya budaya lokal (Madura) yang lebih menekankan kemandirian bagi si anak. Salah satu yang menjadi kelaziman di masyarakat pendalungan tersebut adalah mengajak anaknya untuk bekerja secara dini. Misalnya, mulai kecil sudah diperkenalkan dengan lingkungan pekerjaan, yaitu dengan mengajak anaknya ikut ke gudang, jadi sembari bekerja juga mengasuh anaknya. Ketika secara fisik anaknya sudah tergolong mampu untuk melakukan pekerjaan di tembakau, maka anaknya cepat-cepat disuruh bekerja.

Umumnya para orang tua berpendapat lebih baik secara dini diajak bekerja daripada sekolah, karena dengan bekerja selain mendapat upah juga, lebih siap untuk berumah tangga. Sedangkan kalau sekolah, selain mengeluarkan uang yang cukup besar bagi mereka, juga anak tidak siap untuk berumah tangga, karena tidak bisa mandiri. Maka tidak heran kalau masih banyak munculnya pernikahan dini, karena apabila anak perempuan sudah pernah bekerja di tembakau, umumnya dijodohkan dengan anak-anak laki-laki yang sudah bekerja di perkebunan tersebut.

Putus sekolah yang terjadi pada buruh anak yang bekerja di sektor perkebunan ini, menurut penelitian Mashud dan Suyanto sebenarnya juga terjadi di hampir pedesaan daerah *tapal kuda* di Jawa Timur, yang merupakan mayoritas masyarakat Madura. Putus sekolah pada awalnya dilakukan karena sering membolos, terutama mulai musim tanam tembakau. Bahkan pada masa puncak, yaitu musim panen, tak heran kalau banyak sekali anak yang meninggalkan kelasnya untuk bekerja di warengan atau gudang. Jadi bagi anak-anak yang sudah merasa terikat dengan pekerjaannya dan sudah mulai merasakan memegang uang sendiri, maka bisa dipahami jika mereka pada akhirnya memilih putus sekolah ditengah jalan daripada melanjutkan sekolah yang belum jelas manfaatnya.

Pemilihan dan keterpaksaan buruh anak perempuan yang acapkali berhenti sekolah, tidak lepas dari budaya etnis Madura yang masih menganut budaya *patriarkhi*, dimana lebih mendahulukan atau yang menjadi prioritas laki-laki dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pendidikan. Anak perempuan yang lebih dipentingkan adalah ketrampilan bukan kepintaran otaknya. Karena perempuan nantinya jika berumah tangga, bekal yang utama adalah ketrampilan mengatur rumah tangga. Maka tak heran pekerjaan buruh anak perempuan tersebut, kalau mau dirinci, tidak berhenti setelah pekerjaan diperkebunannya selesai, tapi umumnya dilanjutkan dengan tugas-tugas domestik, seperti menyapu halaman, memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Kombinasi pekerjaan domestik dan perkebunan itu menjadi acara rutin sehari-hari buruh anak perempuan, mulai dari bangun pagi sampai malam hari. Sementara itu bagi buruh anak laki-laki, hampir tidak ada sama sekali pekerjaan domestik yang harus rutin dikerjakannya. Setelah selesai bekerja di perkebunan, maka selesai sudahlah pekerjaannya di hari itu, sehingga di rumah tinggal makan dan istirahat.

Memang keterlibatan anak-anak dalam sektor perkebunan tembakau, tidak bisa lepas dari latar belakang orangtuanya. Sebagian besar orang tua mereka adalah berasal dari kalangan buruh juga, yang tingkat pendidikannya rata-rata tidak tamat sekolah dasar, bahkan ada yang buta huruf. Malahan ada pekerjaan yang ditekuni oleh buruh anak tersebut merupakan warisan dari orang tuanya yang juga pernah bekerja di perkebunan tembakau tersebut.

Keterlibatan anak-anak di pedesaan dalam pekerjaan di sektor publik, memang tidak dapat dipungkiri faktor ekonomi selalu menjadi alasan utama. Selain tekanan kemiskinan, sebetulnya masih ada faktor lain yang mendorong anak-anak di pedesaan cenderung atau terpaksa terlibat dalam kegiatan produktif.

Pertama, karena faktor kultural atau tradisi masyarakat yang “mewajibkan” anak-anak sejak dini terbiasa bekerja sebagai bagian dari proses sosialisasi untuk melatih anak mandiri dan berbakti kepada orang tua. *Kedua*, karena pengaruh *peer group* dan lingkungan sosial yang kondusif mendorong anak bekerja dalam usia dini. Di pedesaan, bagi anak-anak bekerja tidak selalu dipahami sebagai sebuah beban yang mengganggu, melainkan justru mereka acapkali merasa dengan bekerja mereka dapat sekaligus bermain bersama-sama teman-temannya. *Ketiga*, karena daya tarik yang ditawarkan kegiatan produktif itu sendiri bagi anak-anak. Dengan bekerja terbukti anak-anak dapat memiliki penghasilan dan bahkan tak jarang punya otonomi untuk mengelola uang yang diperolehnya secara mandiri.

Buruh anak ini bekerja di sektor perkebunan tembakau selain minimnya alternatif lagi pekerjaan di desa, juga disebabkan ikut-ikutan atau diajak oleh saudara atau orang tua mereka untuk menekuni pekerjaan buruh tersebut. Maka tidaklah heran kalau kemudian ketika ditanyakan mulai umur berapa mereka bekerja di perkebunan tembakau, terbilang sangat muda sekali, ada yang mengaku mereka bekerja ketika umurnya masih sembilan tahun atau setara dengan kelas tiga Sekolah Dasar. Meskipun pada saat itu mereka hanya bekerja mendampingi orang tuanya atau saudaranya di perkebunan rakyat, tetapi paling tidak telah membantu dan

secara langsung disosialisai untuk menekuni pekerjaan sebagai buruh perkebunan. Ada beberapa kasus ditemukan bahwa anak mendapatkan *pipil* dari orang tuanya untuk menggantikan bekerja di gudang tembakau tersebut. Tanpa cara seperti ini seorang anak umumnya lebih sulit mendapatkan pekerjaan di perkebunan, karena semakin lama semakin banyak calon buruh, baik yang tergolong dewasa maupun yang masih tergolong anak-anak.

Pekerjaan di perkebunan tembakau ini terbagi menjadi tiga bagian, pertama di kebun (*Warengan*), gudang *atak* dan yang terakhir di gudang seng. Kegiatan di *warengan* mulai dari pengolahan tanah, penanaman tembakau, penyiraman sampai pada pemetikan daun tembakau. Di gudang *atak* ada proses *penyujuenan* dan pengovenan. Sedangkan di gudang seng lebih banyak proses pemisahan atau pemilahan daun berdasarkan kualitasnya, yang pada akhirnya ada pengepakan.

Pekerjaan di *warengan* dibandingkan dengan pekerjaan dibagian lainnya lebih mudah dilakukan, umumnya bisa dilakukan oleh siapapun termasuk anak-anak. Pekerjaan di kebun dimulai sekitar jam 07.00 sampai 11.00, kemudian istirahat dan kembali sekitar jam 13.00 samapai 16.00. dengan upah sekitar Rp. 9.200,- . Sementara itu untuk pekerjaan di gudang atak dimulai dari kegiatan penyujenan daun tembakau dengan menggunakan *rami* dan kemudian diikatkan pada rangkaian bambu (*langkong*). Untuk pekerjaan ini upahnya tergantung berapa banyak rami yang diperoleh, namun umumnya standar upah untuk *penyujuenan* sebesar Rp. 10.500, dan lebih banyak dilakukan oleh buruh perempuan. Setelah proses *penyujuenan* yang dilakukan pada pagi hari tersebut sekitar pukul enam sampai pukul 11.00, malamnya ada proses pengovenan, yang dimulai sekitar jam 18.30 sampai 24.00. Untuk pengovenan ini umumnya dilakukan oleh laki-laki, hampir tidak ada perempuan yang melakukan pekerjaan yang diupah sebesar Rp. 9200.

Setelah cukup proses pengovenannya kemudian *raminya* dilepas dan menuju proses di gudang seng. Di Gudang seng ini jam kerjanya lebih eksak, yang dimulai pukul 07.00 sampai pukul 16.00, dengan jam istirahat di siang hari selama satu jam. Buruh anak perempuan diupah sebesar Rp. 9.200, yang bertugas membuang tulang daun (*nyoreh melet*), meratakan daun (*birbir*) dan memilah daun (*peladin*). Sedangkan buruh laki-laki diupah sebesar Rp. 10.000,-. Sekali pembedaan upah ini selalu dikaitkan dengan pekerjaan fisik seperti mengangkat tembakau yang dilakukan oleh buruh laki-laki sehingga upahnya juga harus lebih besar dibandingkan buruh perempuan.

Bervariasinya jam kerja yang dilakukan buruh anak, dipengaruhi oleh keikutsertaan dalam setiap kegiatan, dan juga dibagian mana saja buruh anak tersebut terlibat. Keadaan ini terjadi karena disetiap bagian atau tahapan di perkebunan tersebut berbeda-beda. Misalnya, kalau seorang buruh anak yang hanya ikut bekerja di *warengan* saja maka rata-rata jam kerjanya akan berbeda dengan mereka yang bekerja di gudang seng atau gudang atak. Kalau di *warengan* ikut penuh sehari berarti jam kerjanya sekitar 6 sampai delapan jam. Sementara kalau bekerja di Gudang seng, karena jadwal kerjanya sudah pasti, yaitu jam 07.00-16.00 istirahat sekitar 1 jam, maka rata-rata jam kerjanya 8 sampai 10 jam. Sedangkan di gudang *atak* pekerjaannya ada yang semi-borongan, seperti penyujenan daun tembakau umumnya dihitung dengan beberapa banyak penyujenan daun tembakau yang sudah di *rami* oleh buruh tersebut dan ada juga yang eksak dibayar sesuai jenis pekerjaannya di gudang *atak*, seperti pekerjaan pengovenan, dan *ngrempos*.

Sebagian besar buruh anak umumnya bekerja dalam satu tahapan dalam proses produksi tembakau. Selain karena perekrutannya berbeda, juga dikarenakan ada pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan sekaligus dalam satu waktu bersamaan, seperti kalau sudah ikut di pemetikan daun tembakau, berarti tidak mungkin ikut dalam *penyujuenan*, karena pekerjaan *penyujuenan*

tersebut dilakukan segera setelah mobil pengangkut yang dari sawah itu datang. Hal itu dilakukan karena untuk menjaga tingkat kesegaran daun tembakau tersebut dan juga supaya kualitas daun tembakau nantinya akan menjadi baik.

Dari temuan lapangan diperoleh upah yang rata-rata bisa diperoleh oleh buruh anak dalam satu musim tanamnya. Ternyata ada sekitar 75 persen mengaku besar upah yang sering bisa diperoleh mereka adalah antara Rp, 120.000 ribu sampai Rp. 145.000.

Besar upah buruh anak tersebut merupakan angka rata-rata upah yang diterimanya per musim tanam. Dalam menghitung pendapatannya dalam satu kali musim tidak bisa langsung dikalikan upah hariannya dengan empat bulan—satu musim. Namun sangat tergantung dari keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan yang ada dalam masing-masing tahapan dalam proses produksi perkebunan tembakau tersebut. Jika dihitung rata-rata jumlah hari bekerja efektif, dalam satu musim tanam, yang bisa dilakukan buruh diworengan sekitar 15 hari, sedangkan digudang atak hampir sama yaitu sekitar 15 sampai 20 hari. Sementara itu untuk gudang seng lebih jelas pendapatannya karena hampir setiap hari masuk, kecuali minggu, dan waktu yang bisa dikerjakan sekitar 30 hari. Jadi kalau diworengan atau digudang atak ikut terus dalam setiap kegiatan akan membawa uang sekitar Rp. 138.000,- sampai 184.000,-. Sementara itu kalau di gudang seng akan mendapatkan sekitar Rp. 276.000,-. Hitungan ini merupakan hitungan yang maksimal bagi seorang buruh anak, karena umumnya buruh anak tersebut bekerja efektifnya acapkali dibawah rata-rata dalam satu kali musim tanam. Seperti yang terungkap dalam tabel di atas menunjukkan bahwa upah yang diterima buruh anak dalam satu kali musim tanam sebagian besar masih dibawah rata-rata jumlah hari efektif yang bisa dilakukan oleh seorang buruh di perkebunan tembakau.

Upah yang buruh anak yang sebagian besar berada dalam kategori Rp. 120.000,- sampai 145.000,- per musimnya tersebut, umumnya diberikan pada akhir pekan atau para buruh menyebutnya dengan *sabtu-an*. Dengan perolehan upah tersebut ternyata mampu membantu menambah pemasukan ekonomi bagi keluarga yang rata-rata tergolong miskin tersebut. Keadaan ini terjadi karena upah yang diterimanya tersebut sebagian besar diserahkan buruh anak ke orang tuanya untuk kebutuhan belanja sehari-hari. Sedangkan sisanya dipergunakan untuk keperluan jajan atau kalau perempuan untuk membeli bedak dan sabun. Sinyalemen Scott tentang masih bertahannya keluarga miskin di tengah gejolak ekonomi yang tidak menentu tersebut, karena adanya mekanisme *survival* dalam keluarga tersebut, benar adanya, hal ini dibuktikan dengan keterlibatan buruh anak dalam ikut mengatasi ekonomi keluarga.

Bila ditanyakan sejak kapan para buruh anak tersebut mulai bekerja di perkebunan tembakau, sebenarnya harus dipilah-pilah antara perkebunan rakyat dengan perkebunan yang dikelola oleh perusahaan, baik itu swasta maupun tembakau seperti PTPN X. Hampir sebagian besar buruh anak yang diamati penelitian ini, ternyata pernah bekerja pada petani-petani besar yang berada disekitar rumahnya. Pada awal mulanya mereka hanya membantu orang tuanya atau saudaranya, tapi lama-kelamaan sudah bisa secara mandiri bekerja. Maka tak heran kalau ada yang mengaku mulai kerja di tembakau ini sudah sejak umur sembilan tahun, yang merupakan usia yang tergolong muda, dan kalau disetarakan hampir sama dengan anak yang sekolah kelas tiga sekolah dasar (SD). Temuan penelitian ini menunjukkan separo buruh anak (58 persen), mulai bekerja di perkebunan tembakau sekitar umur 11 sampai 13 tahun, dan umumnya pada kategori umur inilah para buruh anak tersebut pertama kali bekerja di perkebunan tembakau.

Sementara itu jika dilihat dari lamanya buruh anak tersebut telah bekerja di perkebunan tembakau tersebut rata-rata mengaku sudah 3 sampai 5 tahun menekuni pekerjaan tembakau tersebut. Pengalaman bekerja di atas tiga tahun tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya para buruh anak tersebut sudah terampil dengan model pekerjaannya, apalagi pekerjaan di tembakau

ini lebih banyak menekankan pada kesabaran dan ketelitian daripada keahlian secara ilmu pengetahuan. Pekerjaannya memang lebih banyak sifatnya monoton dan tidak ada model rotasi pekerjaan, sehingga setiap musimnya pekerjaannya tidak berbeda dengan musim sebelumnya.

Lama bekerja buruh anak perempuan adalah pengalaman kerja mereka di PTPN X yang hasil upahnya atas namanya sendiri. Sebenarnya kalau diteliti lebih mendalam, ternyata anak-anak yang menjadi pekerja di PTPN X sudah terampil sekali bekerjanya, karena sejak usia belia mereka sudah diajak ke tempat kerja tembakau oleh para orang tuanya. Jadi orang tuanya sambil mengasuh anak juga bekerja. Jadi tak heran kalau kemudian buruh anak pada usia belia tersebut juga kadang-kadang ikut membantu orang tuanya menyelesaikan pekerjaan di perkebunan tembakau itu, baik di perkebunan rakyat maupun perkebunan tembakau. Malahan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ada yang mengaku umur 9 tahun atau bahkan lebih muda lagi sudah bekerja di perkebunan tembakau, meskipun hasil pekerjaan masih atas nama orangtuanya.

Hampir semua studi tentang buruh anak baik di sektor formal dan informal menunjukkan bahwa banyak tindakan-tindakan yang dilakukan majikan atau perusahaan merugikan anak. Buruh anak tersebut dengan posisinya yang tak berdaya, sangat rentan terhadap eksploitasi ekonomi. Di sektor formal misalnya, umumnya berada dalam kondisi jam kerja yang panjang, berupah rendah, gangguan kesehatan, pelecehan seksual dan kesewenangan perusahaan.

Begitu juga di perkebunan tembakau yang menjadi lokasi penelitian ini, masih banyak ditemukan wujud ketidak berdayaan dan eksploitasi buruh anak yang terjadi dalam kegiatan produksinya, mulai dari persoalan hubungan kerja sampai dalam hal yang menyangkut harga diri, seperti pelecehan seksual dan lain-lainnya.

Sebelum membahas lebih rinci tentang keadaan posisi buruh anak diperkebunan, tidaklah pas kalau tidak membicarakan dulu tentang fasilitas-fasilitas yang diterima buruh anak dalam pekerjaannya sehari-hari diperkebunan. Kondisi dan fasilitas yang diperoleh buruh anak, sebenarnya tidak berbeda dengan apa yang diterima para buruh dewasa. Fasilitas yang umum terdapat di perusahaan-perusahaan lain, juga terdapat di perkebunan tembakau ini, namun karena buruh anak kebanyakan merupakan buruh harian atau borongan, maka ada beberapa fasilitas yang tidak diperoleh dari perusahaan, seperti makan, kursus pendidikan, pakaian kerja dan lain-lainnya. Sementara itu untuk upah lembur, THR, dan jam istirahat yang cukup juga sempat dirasakan para buruh anak.

Fasilitas kerja yang paling dikeluhkan oleh para buruh anak adalah tidak diberikannya masker penutup hidung untuk paling tidak menyaring bau daun tembakau, terutama yang ikut dalam proses pengopenan yang dilakukan di ruang tertutup dan penuh dengan asap, begitu juga dengan yang bertugas *merempos* dan membenahi daun tembakau yang sudah diopen, juga tanpa diberi pelindung. Lebih parah lagi tidak ada pemeriksaan yang secara berkala melihat perkembangan kesehatan, terutama paru-paru para buruh tersebut. Melihat kondisi lingkungan perkebunan tersebut, maka tak khayal lagi kesehatan dan pertumbuhan anak-anak yang menjadi buruh tersebut menjadi ancaman yang serius bagi kelangsungan kesehatannya di kemudian hari.

Fasilitas-fasilitas yang diakui pernah diterima oleh buruh anak masih tergolong minim dibanding dengan perusahaan industri lain yang sudah dalam taraf memperhatikan jaminan kesehatan dengan didirikannya poliklinik bagi para pekerjanya. Fasilitas yang banyak dirasakan buruh adalah hanya minum (87 persen) dan waktu istirahat yang cukup (86 persen). Sementara fasilitas lainnya, persentase dibawah lima puluh persen, artinya kebanyakan buruh anak merasa tidak pernah menikmati fasilitas dari perkebunan.

Keadaan fasilitas yang minim ini terjadi karena perkebunan menganggap bahwa para pekerja perkebunan merupakan buruh musiman yang hanya bekerja pada musim tembakau saja, sehingga tidak ada fasilitas yang sebaik dengan buruh di industri lainnya yang merupakan pekerja tetap dan diupah secara bulanan tersebut. Maka wajar kalau seringkali buruh anak tersebut harus membawa *bontotan* (makanan) dari rumah untuk dimakan waktu istirahat, meskipun ada juga yang membeli jajanan pada waktu istirahat.

Buruh anak perempuan: Eksploitasi dan ketidakberdayaan

Di dalam struktur organisasi yang ada di perkebunan ujung tombak dari PTPN X adalah mandor. Mandor memang menurut pembagian kerjanya bertugas secara langsung mengawasi kinerja dari buruh perkebunan. Sementara itu untuk memudahkan menjalankan tugas sebagai pengawas kinerja buruh tersebut, secara informal mandor dibantu oleh seseorang kepercayaannya, yang juga buruh perkebunan. Orang kepercayaan mandor ini dikenal dengan istilah *mbok/lokal*, biasanya berasal dari buruh yang sudah senior. Tugas *mbok* ini bukan hanya sekadar membantu untuk mencarikan orang yang bisa bekerja di perkebunan, tetapi juga ikut membantu mengawasi pola tingkah laku dan kualitas pekerjaan para buruh.

Yang menarik untuk dikaji lebih awal dan mendalam adalah bagaimana peran mandor dan “asistennya” yang dikenal dengan *mbok*, dengan alasan yang harus bisa diterima para buruh anak, terutama buruh anak yang baru bekerja untuk menyetor uang pada kedua orang tersebut, bisa langsung membayarnya pada waktu pertama kali masuk bekerja atau melalui pemotongan upah yang diterima setiap minggunya. Dengan cara yang terakhir ini seolah-olah tidak ada paksaan dan kelihatan pemberian yang sukarela, namun kenyataannya itu sudah berlaku umum dan semua buruh sudah tahu sama tahu. Besarnya potongan sekitar 10 sampai 20%.

Jadi dengan menggunakan “kemasan” balas jasa atau tanda terima kasih tersebut, seolah-olah tidak terjadi pemaksaan pemotongan upah dan dianggap sebagai aturan yang tak tertulis yang secara otomatis berlaku hampir dari generasi ke generasi. Ketidakberdayaan yang dialami buruh anak dalam pemotongan upah ini, sebenarnya juga tidak terlepas dari cukup banyaknya peminat yang ingin bekerja di sektor perkebunan tersebut, terutama bagi kaum perempuan. Keadaan ini menyebabkan secara tidak langsung memungkinkan terjadinya atau munculnya jaringan koneksi yang bisa masuk bekerja di perkebunan. Konsekwensi adanya koneksi tersebut membawa dampak pada pemberian sesuatu pada *mbok* atau mandor, yang tak jarang selain adanya pemotongan upah juga masih ditambah pemberian “sukarela” seperti sembilan kebutuhan pokok (sembako) yang umumnya diantarkan ke rumah mandor atau *mbok*.

Dari data lapangan, juga menunjukkan perlakuan eksploitatif lainnya, yaitu: masalah kerja lembur dan dimarahi yang merupakan pengalaman sehari-hari yang sering dirasakan para buruh anak, yang persentasenya sekitar 50 sampai 70%.

Dalam hubungan kerjanya di perkebunan, buruh anak umumnya juga menjadi tumpuan kekesalan para mandor atau *mbok*. Mandor memang lebih berani dan lebih sering memarahi buruh anak dibandingkan dengan buruh dewasa. Karena dianggap buruh anak masih perlu dibina dan tidak berani membantah. Begitu juga dengan *mbok*, yang merasa diberi kewenangan oleh mandor dan juga sebagai bentuk rasa tanggungjawab pada mandor, karena para *mbok* itu ikut merekomendasi anak-anak tersebut bekerja di perkebunan tembakau.

Perlakuan lain di perkebunan yang menjadi sorotan para buruh anak adalah tentang kerja lembur yang dilakukan buruh anak. Pekerjaan lembur biasanya muncul pada saat pertengahan sampai akhir masa petik daun, karena pada saat itu proses produksi terus berjalan berurutan seolah tanpa ada hentinya mulai pemetikan, pengovenan, penyortiran sampai pada pengepakan.

Yang menjadi keluhan buruh anak adalah kebanyakan kerja lembur tidak selalu berarti tambahan upah yang cukup, karena dalam beberapa kasus kerja lembur yang dilakukan buruh anak, dianggap merupakan sisa pekerjaan yang tidak bisa dicapai dengan waktu yang sudah distandardkan sehingga perkebunan merasa tidak perlu memberi upah lembur.

Ketidakterdayaan buruh anak tidak hanya berhenti pada persoalan waktu kerja saja, tetapi juga perlakuan dalam pengaturan waktu istirahat. Dalam aturan perusahaan istirahat dilakukan pada siang hari selama satu jam, umumnya jam 12.00 sampai jam 13.00. Dalam kenyataan aturan ini lebih banyak merupakan aturan yang hanya tertulis di kertas, namun keadaan di lapangan sangatlah berbeda. Jika di gudang seng aturan jam istirahat relatif masih bisa dilakukan dengan baik, karena pekerjaan di gudang seng bisa tunda dan tidak diburu oleh pengaruh cuaca disamping itu daun tembakaunya sudah kering, sedangkan untuk pekerjaan di gudang atak, jadwal kerja tidak sama dengan di gudang seng, dan jadwalnya lebih tergantung dari banyak-tidaknya daun tembakau yang masuk ke gudang, semakin banyak daun tembakau yang masih basah itu masuk gudang, kemungkinan jadwal kerjanya jadi lebih penjang dari biasanya, sehingga berakibat waktu istirahat jadi tidak menentu.

Perlakuan yang tidak menyenangkan di atas, menarik untuk dikaji lebih dalam, ketika dibandingkan dengan data tentang penghargaan, sanjungan atau apapun istilahnya yang merupakan pemberian baik berupa materi atau pujian yang diterima buruh anak tersebut dari pihak pengelola perkebunan tembakau. Dari temuan data, terungkap bahwa perusahaan yang diwakili oleh mandor sebagai pelaksana langsung di lapangan, diakui oleh sebagian besar buruh anak sekitar 60 persen bahwa tidak pernah memberikan penghargaan (*reward*) pada buruh anak yang melakukan pekerjaan dengan baik.

Penghargaan materi yang diterima buruh anak, seperti bonus upah atau pemberian barang lainnya, jelas tidak pernah diterima buruh anak, karena menurut pengalaman buruh anak selama ini, tidak pernah ada yang mendapat bonus tersebut, apalagi sebagian besar buruh anak merupakan pegawai yang tidak tetap, karena mereka ada yang diupah harian dan ada juga yang di upah borongan.

Ketidakterdayaan perkebunan dan terutama mandor sebagai pengawas langsung buruh akan penghargaan seperti pujian, menunjukkan bahwa mandor masih beranggapan bahwa yang butuh kerja itu adalah buruh, maka sudah menjadi kewajibannya buruh harus bekerja dengan baik, artinya bekerja memenuhi target, tidak pernah membolos dan pekerjaan rapi adalah memang sudah tugas dan kewajiban yang harus dijalankan oleh buruh yang bekerja di perkebunan tembakau. Keadaan ini menambah deretan panjang dari perlakuan yang tidak menyenangkan yang diterima buruh anak dan juga menunjukkan proses marginalisasi buruh anak dan ketidakberdayaan menghadapi tekanan struktural tersebut.

Jika dilihat sepiintas dari kondisi dan fasilitas yang diterima buruh perkebunan tidak ada perbedaan antara buruh anak dan buruh lainnya, namun berdasarkan kajian yang lebih dalam mengungkapkan bahwa ternyata ada perbedaan perlakuan antara buruh anak dan buruh dewasa, seperti yang ditemukan di lapangan, mengungkapkan bahwa ada sekitar 47 persen buruh anak mengakui ada perbedaan dan 79 persen buruh anak juga merasakan adanya perbedaan perlakuan antara buruh perempuan dengan buruh laki-laki, misalnya soal upah lembur dan upah harian.

Ada beberapa kasus yang menunjukkan bahwa buruh anak yang bekerja dengan waktu yang sama dengan buruh dewasa, acap kali upah yang diterima lebih kecil dibandingkan dengan buruh dewasa, apalagi buruh anak perempuan upahnya lebih sedikit dibandingkan dengan buruh anak laki-laki. Alasan yang sangat klasik yang dikemukakan, yaitu bahwa pekerjaan

anak laki-laki lebih banyak mengandalkan otot dibandingkan dengan buruh perempuan, makanya wajar kalau buruh laki-laki diupah lebih besar daripada buruh perempuan.

Perbedaan dalam hal upah yang diterima buruh anak laki-laki dan perempuan serta antara buruh anak dan buruh dewasa. Salah satu contoh perbedaan upah tersebut adalah pada saat kerja di gudang seng, dimana buruh perempuan yang bekerja mulai jam 07.00 sampai dengan 16.00, dengan istirahat sekitar satu jam dibayar sekitar Rp. 9.000,- sedangkan buruh laki-laki dibayar sekitar Rp. 10.000,-. Perbedaan upah ini sekali lagi karena dianggap laki-laki lebih banyak mengeluarkan tenaga (energi) yang lebih besar dibandingkan dengan perempuan, karena pekerjaannya memikul, mengangkut dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pekerjaan kasar. Sedangkan buruh perempuan pekerjaan lebih santai karena mengerjakannya sambil duduk dan seolah-olah hanya tangannya yang berfungsi bekerja.

Asumsi pengupahan yang berdasarkan sifat maskulin dan feminin tersebut sudah menjadi hal yang wajar dalam lingkungan perkebunan, sehingga sudah dianggap sebagai aturan yang tak terbantahkan, dan keadaan inilah yang akan melestarikan budaya *patriarkhi*, yang menganggap bahwa laki-laki memang harus dinilai lebih dibandingkan dengan perempuan. Padahal kalau dikaji lebih dalam pekerjaan perempuanlah sebenarnya yang memerlukan energi dan kekuatan yang lebih dibandingkan dengan buruh laki-laki.

Persoalan pembedan upah di perkebunan ternyata sudah menjadi masalah sejak jaman kolonial Belanda. Studi Ann Stoler (1995) menemukan bahwa upah perempuan tidak pernah lebih dari 50 persen upah laki-laki. Sementara itu penelitian Giddens (1987) di perkebunan teh, juga menemukan hal yang tidak jauh berbeda, bahwa di perkebunan tersebut juga terjadi segregasi gender dalam pengupahan. Buruh perempuan yang sebagian besar (sekitar 80%) mendominasi perkebunan mendapatkan upah yang lebih rendah, dengan sistem pengupahan harian lepas dibandingkan dengan buruh laki-laki yang jumlahnya lebih sedikit dengan menggunakan buruh harian tetap.

Dari data di lapangan, ada perbedaan perlakuan antar buruh di perkebunan, dengan persentase yang paling banyak adalah masalah kerja lembur 36,2% dan 19 % dan upah 42,5 % dan 55,7 % yang diterima selama menjadi buruh perkebunan.

Persoalan upah merupakan masalah klasik, para buruh anak di perkebunan menanggapi soal upah seolah-olah sudah pasrah, menerima berapapun yang akan diberikan oleh mandor yang menggajinya. Buruh anak lebih banyak melihat patokan upah bukan berasal dari perhitungan yang rasional yang sudah mereka perhitungkan, tetapi lebih banyak *nrimo* berapapun yang diberi mandor, asal sama dengan besar upah teman sebayanya yang sama-sama bekerja dalam satu bagian. Jadi kalau kerja *warengan*, misalnya, kalau temannya mendapat upah sebesar Rp. 8000, maka buruh anak tersebut tidak banyak tanya dan protes akan menerima sama sebesar Rp. 8.000 juga, meskipun waktu kerjanya kalau dihitung berdasarkan standar gaji, harusnya dibayar Rp.9.200,-. Pihak perkebunan (mandor) memang acapkali membedakan upah buruh anak dengan buruh dewasa, terutama mereka yang masih baru bekerja di PTPN X tersebut. Perbedaan upah dengan buruh dewasa, umunya berkisar antara Rp. 1000,- sampai Rp. 2.500,-, meskipun sebenarnya jumlah jam kerja buruh anak tersebut sama lamanya.

Untuk kasus upah lembur, pihak perusahaan, terutama mandor masih menganggap meskipun anak ikut dalam lembur, hasil aktivitas pekerjaannya dianggap lebih sedikit dibandingkan dengan buruh dewasa. Berbagai alasan dikemukakan, ada yang karena menganggap pekerjaan buruh anak lebih lambat, kurang rapi dan alasan lainnya yang memungkinkan mandor mengupah lebih rendah. Penelitian White & Tjandraningsih (1995) dalam studi kualitatif mengenai pekerja anak, usia 7 – 18 tahun di industri manufaktur skala kecil dan besar di Jawa Barat, mengungkapkan bahwa pembagian kerja tidak didasarkan usia, tetapi berdasarkan jenis

kelamin. Anak laki-laki mengerjakan pekerjaan laki-laki dewasa, demikian juga buruh anak perempuan mengerjakan tugas yang sama dengan buruh perempuan dewasa. Mengenai upah, kedua peneliti ini juga menemukan bahwa buruh anak di upah lebih rendah, padahal produktivitasnya sama dengan buruh dewasa.

Sementara itu, temuan data di lapangan menunjukkan bahwa jenis gangguan yang buruk di perkebunan, menurut buruh anak selain persoalan polusi udara ada 54%, ternyata masalah pelecehan seksual menempati peringkat kedua dengan persentase 14%. Di perkebunan tembakau buruh perempuan dewasa dan buruh anak perempuan mempunyai nasib yang sama soal pelecehan seksual. Bahkan buruh anak dalam posisi yang lebih rawan karena selain pelecehan itu dilakukan oleh para mandor yang selalu mengawasinya, banyak juga buruh dewasa laki-laki yang cukup sering ikut-ikutan melakukan pelecehan baik itu melalui kata-kata maupun dengan menyentuh bagian tertentu dari tubuh buruh anak perempuan tersebut.

Persoalan pelecehan seksual di perkebunan menjadi menarik, karena di tengah mayoritas buruh perempuan yang bekerja, ternyata perempuan jugalah yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut. Buruh anak yang sebagian besar juga perempuan, seolah-olah sebagai “obyek” yang mudah untuk dilecehkan. Pernyataan ini muncul karena buruh anak perempuan cukup sering mengalami pelecehan seksual mulai dari mandor, mbok, buruh senior baik laki-laki maupun perempuan, bahkan ada juga dilakukan oleh buruh anak laki-laki.

Pola pelecehan seksual yang dialami buruh anak perempuan ada dua, pertama, mandor, buruh senior dan anak yang berjenis kelamin laki-laki. Pelecehan seksualnya lebih beragam, mulai dari menggunakan kata-kata, misalnya merayu, menggoda, atau menyebut bagian tubuh dari buruh anak perempuan sampai pada tindakan memegang atau mencolek bagian tertentu tubuh buruh perempuan tersebut. Pelecehan seksual yang dilakukan oleh kaum laki-laki ini umumnya tindakan yang “iseng”, karena dianggap buruh anak tidak akan marah bila dilecehkan. Pola kedua, oleh *mbok*, buruh senior yang perempuan. Pelecehan seksualnya hanya sebatas menyebutkan bagian tubuh perempuan atau yang berkaitan dengan kegiatan perempuan, biasanya dikaitkan dengan kritik kualitas pekerjaan yang dikerjakan oleh buruh anak perempuan. Misalnya jika buruh anak perempuan melakukan pekerjaan selalu lambat atau tidak cekatan, disindir bahwa bisanya cuma membesarkan “pantat”. Ada juga yang menghubungkan tata riasnya dengan pekerjaannya, seperti bisanya cuma merias (*dandan*), tetapi kalau disuruh bekerja tidak rapi.

Perlakuan-perlakuan yang diterima buruh anak dalam beberapa kasus di atas membuktikan bahwa posisi buruh anak selalu berada dalam dua kondisi, pertama, dalam hubungan kerjanya berada dalam pihak yang mudah dimarahi, diperlakukan semena-mena dan perlakuan tidak adil lainnya oleh mandor yang dalam struktur merupakan atasan langsungnya. Kemudian yang kedua, buruh anak di tempat kerjanya juga harus menghadapi perlakuan yang tidak menyenangkan dari kalangan buruh senior, mulai dari sebagai *kambing hitam* bila ada pekerjaan yang tidak selesai sesuai target sampai dengan pelecehan seksual. Keadaan inilah yang membuat buruh anak selalu tidak bisa bebas dan dalam posisi marginal ganda (*double marginal*) karena terjepit antara dua pihak, pihak yang terkait dengan struktur (mandor) dan sesama buruh, tetapi yang dewasa (buruh senior).

Strategi pemberdayaan buruh anak perempuan

Langkah awal yang semestinya disadari bahwa pemberdayaan masyarakat miskin (seperti keluarga buruh anak perempuan), sesungguhnya akan selalu berkaitan atau sekurang-kurangnya mencakup tiga aspek. *Pertama*, berkaitan dengan upaya peningkatan posisi tawar (*bargaining*

position) masyarakat miskin (termasuk buruh anak) melawan kekakuan (*rigidity*) dan sifat eksploitatif dari struktur yang membelenggu mereka. Artinya, program pembangunan sosial dan upaya penanggulangan kemiskinan seyogianya tidak hanya terjebak pada program-program yang sifatnya karitatif dan apalagi yang bersifat punitif, melainkan harus lebih mengedepankan program-program yang berorientasi pada proses pemberdayaan, yang intinya bersifat *people centered, participatory, empowering, dan sustainable*. *Kedua*, berkaitan dengan upaya mengurangi kadar kerentanan dan sekaligus bagaimana memperkuat penyangga sosial-ekonomi keluarga miskin (buruh anak perempuan). Dalam hal ini, salah satu hal yang dapat dikembangkan adalah bagaimana mendorong pengembangan kegiatan produktif alternatif keluarga miskin di luar sektor perkebunan. Selama ini, kekurangan pokok yang perlu diperhatikan dari berbagai upaya pengentasan masyarakat miskin yang banyak dipraktekkan adalah bahwa mereka menjadi begitu memusatkan perhatian pada peningkatan kuantitas produksi atau hasil kegiatan produktif masyarakat miskin, sehingga kebutuhan sistem produksi mendapat tempat yang lebih utama daripada kebutuhan masyarakat miskin yang lebih substansial. *Ketiga*, meningkatkan peran lembaga-lembaga lokal dan kelompok sekunder di masyarakat dalam upaya monitoring dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di lapangan. Agar pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan tidak mengalami penyimpangan atau bias di tingkat pelaksanaan, maka prasyarat yang dibutuhkan selain harus ada jaminan bahwa proses pelaksanaan program berjalan secara transparan, yang tak kalah penting adalah harus didukung oleh mekanisme dan sistem kontrol yang kuat, khususnya pelibatan dan kontrol dari masyarakat miskin itu sendiri sebagai kelompok sasaran dan kontrol dari lembaga-lembaga lokal dan kelompok-kelompok sekunder di masyarakat.

Dengan bekal tiga poin di atas, dalam rangka memperbaiki taraf hidup dan memberi peluang kepada buruh anak perempuan di perkebunan tembakau agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya, secara garis besar ada dua jalan yang bisa ditempuh dengan cara: 1) dengan cara meningkatkan kualitas posisi tawar (*bargaining position*) buruh anak perempuan; 2) dengan meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga buruh anak perempuan.

Pilihan mana yang diambil dari dua jalan di atas? Berikut ini, beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan program pemberdayaan buruh anak perempuan di perkebunan tembakau, yaitu: *Pertama*, sejak awal harus disadari bahwa upaya pemberdayaan buruh anak perempuan di perkebunan tembakau tidak mungkin dilakukan hanya dengan cara membolehkan anak berkerja di perkebunan. Pemberdayaan buruh anak perempuan seyogyanya mempertimbangkan dan bahkan harus bertumpu kepada keberadaan pranata sosial-budaya di masing-masing komunitas lokal buruh anak perempuan. Jadi, program apa pun yang digulirkan atas nama program pemberdayaan masyarakat miskin di daerah perkebunan tembakau, khususnya buruh anak perempuan alangkah bijak jika dalam pelaksanaannya tidak mencoba membentuk kelompok-kelompok target di luar organisasi dalam masyarakat. *Kedua*, apa pun bantuan yang diberikan kepada kelompok buruh anak perempuan seyogianya tidak berorientasi pada kepentingan jangka pendek sekadar menekankan pada kepentingan pemberian upah yang sama dengan buruh dewasa, tetapi harus lebih berorientasi pada pemupukkan investasi sosial yang berjangka panjang dan bersifat strategis. Pendek kata, bagi komunitas buruh anak perempuan, program pemberdayaan buruh anak terutama soal kemiskinannya sifatnya holistik, yaitu keterlibatan buruh anak, keluarga dan komunitas lokalnya, serta kebijakan pemerintah yang memihak pada kepentingan buruh anak. Secara ringkas program pemberdayaannya adalah seperti tabel 1.

Tabel 1.

Isu prioritas dan program pemberdayaan buruh anak perempuan di perkebunan tembakau

Isu Prioritas	Program Pemberdayaan	Tujuan
Buruh anak perempuan cenderung rentan, dan menanggung beban berat karena berasal dari keluarga miskin.	<ul style="list-style-type: none"> · Program Pengentasan Kemiskinan bagi keluarga buruh anak perempuan. · Bantuan beras murah bagi keluarga buruh anak perempuan. 	Memperkecil pengeluaran dan meningkatkan penghasilan keluarga buruh anak perempuan.
Bekerja di perkebunan tembakau umumnya tidak dapat lagi diandalkan untuk membantu kebutuhan hidup keluarga buruh anak perempuan, sementara peluang untuk bekerja di luar perkebunan cenderung rendah dan pemilikan ketrampilan alternatif yang kurang memadai	<ul style="list-style-type: none"> · Pelatihan ketrampilan alternatif di sektor non-perkebunan · Bantuan modal usaha bersubsidi/berbunga lunak untuk keluarga buruh anak perempuan. · Pendayagunaan tenaga kerja dalam keluarga buruh anak perempuan untuk pengembangan deversifikasi usaha. 	Meningkatkan peluang dan kemampuan buruh anak perempuan untuk mendapatkan alternatif bekerja di luar perkebunan dan deversifikasi usaha bagi keluarga buruh.
Hubungan produksi umumnya belum berpihak dan menguntungkan buruh anak perempuan akibat posisi tawar (<i>bargaining position</i>) mereka yang lemah	<ul style="list-style-type: none"> · Pemahaman keadaan buruh anak perempuan pada para pemilik tanah dan pengusaha perkebunan. · Sosialisasi aturan hubungan perburuhan pada buruh anak perempuan. 	Meningkatkan posisi tawar buruh anak perempuan dalam hubungan kerja di perkebunan
Sebagian besar buruh anak perempuan pendidikannya rendah	<ul style="list-style-type: none"> · Pemberian beasiswa pendidikan pada buruh anak perempuan 	Meningkatkan kualitas buruh anak perempuan

Simpulan

Temuan pokok Penelitian Pemberdayaan Buruh Anak Perempuan, adalah sebagai berikut: *Pertama*, banyaknya anak perempuan yang bekerja di sektor perkebunan ini, karena pihak perkebunan memang lebih banyak menerima buruh perempuan, alasan utamanya adalah karena buruh perempuan dianggap lebih telaten dan rapi dalam mengatur daun tembakau yang sangat rentan karena mudah robek. *Kedua*, keterlibatan anak-anak di pedesaan dalam pekerjaan di sektor perkebunan, memang tidak dapat dipungkiri faktor ekonomi selalu menjadi alasan utama yang menyebabkan anak-anak tersebut dalam usianya yang masih belia sudah terlibat pekerjaan-pekerjaan orang dewasa. *Ketiga*, dalam hubungan produksi di perkebunan buruh anak perempuan dalam posisi tereksplorasi, marginal dan posisi tawarnya (*bargaining position*) rendah, seperti upah rendah, perbedaan perlakuan dengan buruh dewasa, dan beberapa kasus mengalami pelecehan seksual. *Keempat*, strategi pemberdayaan buruh anak seharusnya berada dalam empat pilar, yaitu buruh anak perempuan, keluarga, komunitas lokal, dan pemerintah.

Daftar Pustaka

- BPS (1999) Sakernas. Unpublished.
- BPS (1999) Indikator Kesejahteraan Anak. <http://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/dasar/pdf?kd=142&th=1999>. Di akses 5 Januari 2013.
- Dahrendorf R (1986) Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri: Sebuah Analisa Kritik. Jakarta: Rajawali Pers.
- Giddens A & Held D (1987) Perdebatan klasik dan Kontemporer Mengenai Kelompok, Kekuasaan, dan Konflik. Jakarta: Rajawali Pers.
- Irwanto dan tim (1995) Pekerja Anak di Tiga Kota Besar: Jakarta, Surabaya dan Medan. Jakarta: Kerjasama Unika Atmajaya dan UNICEF.
- Musta'in dan tim (2001) Studi Kualitatif tentang Pekerja Anak di Jawa Timur, Kerjasama Pusat Studi Ketenagakerjaan Uniar, Bappeda Tk. I Jatim dan UNICEF. Surabaya: Lutfansah Mediatama.
- Scott JC (1994) Moral Ekonomi Petani. Jakarta: LP3ES.
- Stoler AL (1995) Race and the Education of Desire: Foucault's History of Sexuality and the Colonial Order of Things. Durham & London: Duke University Press.
- Suharto E (2005) Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: CV. Refika Aditama.
- Tjandraningsih I (1995) Pemberdayaan Pekerja Anak: Studi Mengenai Pedampungan Pekerja Anak. Bandung: Yayasan Akatiga.

Masyarakat, Kebudayaan dan Politik

eISSN : 25286013 | pISSN : 20867050

[Humanities](#) [Art](#)

[Universitas Airlangga](#)



S2

Sinta Score



Indexed by GARUDA

22

H-Index

21

H5-Index

2872

Citations

2393

5 Year Citations

Journal of Education and Society

Volume 06, Issue 2, June 2021



Journal of Education and Society, Volume 6, Issue 2, June 2021, Pages 1-10

Address:

Jln. Dharmawangsa Dalam, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga
KOTA SURABAYA

Email:

mkp@journal.unair.ac.id

Phone:

031 5017 429

Last Updated :

2021-09-17

2017

2018

2019

2020

2021



Search..



Page 1 of 50 | Total Records : 500

Publications

Citation

Strategi meningkatkan daya tahan budaya lokal dalam menghadapi arus globalisasi
AS Mubah
Masyarakat, Kebudayaan dan Politik 24 (4), 302-308, 2011

142

Stres Kerja: Penyebab dan Alternatif Pemecahannya
L Margiati
Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik 3, 71-80, 1999

95

Transportasi Publik dan Aksesibilitas Masyarakat Perkotaan
S Aminah
Masyarakat, Kebudayaan dan Politik 20 (1), 35-52, 2007

89

Memahami teori konstruksi sosial
IBP Manuaba
Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik 21 (3), 221-230, 2008

66

Kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin
B Suyanto
Masyarakat, Kebudayaan dan Politik 14 (4), 25-42, 2001

57

Publications	Citation
<u>Budaya daerah dan jati diri bangsa: Pemberdayaan cerita rakyat dalam memasuki otonomi daerah dan globalisasi</u> P Manuaba Masyarakat Kebudayaan dan Politik XII, 57-66, 1999	38
<u>The construction of gender identity in Indonesia: Between cultural norms, economic implications, and state formation</u> R Ida Masyarakat, Kebudayaan dan Politik 14 (1), 21-34, 2001	37
<u>Stres kerja di lingkungan dprd: studi tentang anggota dprd di kota surabaya, malang dan kabupaten jember</u> E Dwiyanti Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik 3, 73-84, 2001	36
<u>Komunikasi Partisipatif Pada Program Pos Pemberdayaan Keluarga</u> I Satriani, P Muljono Masyarakat, Kebudayaan dan Politik 25 (2), 87-95, 2012	35
<u>Implementasi komunikasi pemasaran terpadu sebagai penyampai pesan promosi usaha kecil menengah (UKM) di Indonesia</u> S Isnaini Masyarakat Kebudayaan dan Politik 22 (4), 324-332, 2010	35

Page 1 of 50 | Total Records : 500



Citation Statistics



Copyright © 2017
 Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional
 (Ministry of Research and Technology / National Agency for Research and Innovation)
 All Rights Reserved.